



KEBIJAKAN EKONOMI KONTEMPORER

Penyunting:
Suhartono SIP, MPP



Penyunting:
Suhartono, SIP., MPP

KEBIJAKAN EKONOMI KONTEMPORER



Diterbitkan oleh:
P3DI Setjen DPR RI dan Azza Grafika
2015



Judul:

Kebijakan Ekonomi Kontemporer

Perpustakaan Nasional:

Katalog Dalam Terbitan (KDT)

xiv+186 hlm.; 15.5x23 cm

ISBN: 978-602-1247-36-5

Cetakan Pertama, 2015

Penulis:

Lukman Adam

Juli Panglima Saragih

Hariyadi

Achmad Sani Alhusain

Sahat Aditua F Silalahi

Asep Ahmad Saefuloh

Penyunting:

Suhartono, SIP., MPP

Desain Sampul:

Abue

Tata Letak:

Zaki

Penyelia Aksara:

Helmi Yusuf

Diterbitkan oleh:

Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi (P3DI)

Sekretariat Jenderal DPR RI

Gedung Nusantara I Lt. 2

Jl. Jenderal Gatot Subroto Jakarta Pusat 10270

Telp. (021) 5715409 Fax. (021) 5715245

Bersama:

Azza Grafika, Anggota IKAPI DIY, No. 078/DIY/2012

Kantor Pusat:

Jl. Seturan II CT XX/128 Yogyakarta

Telp. +62 274-6882748

Perwakilan Jabodetabek:

Perum Wismmas Blok E1 No. 43-44, Cinangka, Sawangan, Kota Depok

Telp. (021) 7417244

Sanksi Pelanggaran Pasal 72**Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta**

1. Barangsiapa dengan sengaja melanggar dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (1) atau Pasal 49 Ayat (1) dan Ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
2. Barangsiapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran hak cipta atau hak terkait sebagai dimaksud pada ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

KATA PENGANTAR

KEPALA PUSAT PENGKAJIAN, PENGOLAHAN DATA DAN INFORMASI (P3DI) SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI

Puji Syukur kita panjatkan kehadiran Allah SWT, yang atas perkenan-Nya para Peneliti Ekonomi dan Kebijakan Publik Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi (P3DI) Setjen DPR RI dapat menyelesaikan tulisan ilmiahnya dan menerbitkannya dalam buku yang bertajuk “Kebijakan Ekonomi Kontemporer”

Buku ini dibagi dalam enam bab. Bab *pertama*, berisi kajian tentang kebijakan penentuan harga pembelian beras pemerintah. Bab *kedua*, berisi studi tentang kebijakan subsidi pupuk dalam menjaga ketahanan pangan: Studi di Provinsi Sulawesi Selatan dan Provinsi Jawa Tengah. Bab *ketiga*, berisi studi tentang arah pengembangan ketenagalistrikan nasional 35.000 MW.

Bab *keempat*, menjelaskan tentang kebijakan pengembangan ekonomi kreatif. Bab *kelima*, mengkaji tentang permasalahan penyertaan modal negara pada badan usaha milik negara: Studi kasus PT Dok Perkapalan Surabaya dan PT Perekebunan Nusantara X. Bab keenam, menelaah diskursus jumlah penduduk dan kebijakan pembangunan kependudukan.

Akhir kata, saya mengucapkan terima kasih kepada para Peneliti Ekonomi dan Kebijakan Publik yang telah berupaya menuangkan pemikirannya dalam buku ini. Selain itu, saya juga mengapresiasi upaya Saudara Suhartono, SIP, MPP yang telah meluangkan waktu dan pikirannya untuk menyunting tulisan-tulisan dalam buku. Harapan saya, semoga buku ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan pengetahuan dan penentuan kebijakan ekonomi kontemporer di Indonesia. Selamat membaca.

Jakarta, Oktober 2015
Kepala Pusat Pengkajian,
Pengolahan Data dan Informasi

Dr. Rahaju Setya Wardani
NIP. 19600211 198703 2 002

PROLOG

Kebijakan ekonomi membutuhkan pendekatan yang terus berubah mengingat dinamika permasalahan yang terus berubah. Ilmu ekonomi sendiri dianggap sebagai salah satu disiplin ilmu yang baru mulai ada sejak Tahun 1776, yaitu sejak ditulisnya buku berjudul *“An Inquiry Into the Nature and Causes of The Wealth of Nations”* oleh Adam Smith. Adam Smith sendiri dianggap sebagai Bapak Ekonomi Modern karena merupakan tokoh yang pertama kali meletakkan konsep ekonomi secara menyeluruh dan komprehensif.

Gagasan dari Adam Smith tersebut menjadi dasar bagi ahli ekonomi berikutnya, seperti Thomas Malthus, David Ricardo, dan Stuart Mill. Ketiga ahli ekonomi tersebut biasa dikenal sebagai ahli ekonomi klasik yang menghasilkan pendekatan teori ekonomi dengan pendekatan kebijakan makro. Sisi lain dari cabang ilmu ekonomi Adam Smith dikembangkan oleh Karl Marx dan diikuti oleh negara-negara sosialis komunis. *Milestone* lain dari perkembangan ilmu ekonomi terjadi pada saat depresi Tahun 1930 yang melahirkan ahli ekonomi baru, yaitu John Maynard Keynes, dengan bukunya yang berjudul *“General Theory of Employment, Interest, and Money”*.

Permasalahan ekonomi sendiri telah berkembang dengan cukup pesat dan menyentuh aspek politik, sosial, dan budaya. Salah satu penyebabnya adalah globalisasi yang terus berlangsung sehingga menyebabkan permasalahan ekonomi disebuah negara tidak bisa terlepas dari permasalahan ekonomi negara lain. Dengan kata lain, permasalahan ekonomi di sebuah negara terkoneksi dengan permasalahan ekonomi yang terjadi secara global.

Kondisi perekonomian nasional yang telah terkoneksi ini juga menyebabkan pendekatan kebijakan terus berubah. Pendekatan kebijakan yang didasarkan pada teori ekonomi klasik seringkali tidak bisa digunakan dalam memecahkan permasalahan ekonomi kontemporer yang terjadi saat ini. Pendekatan kebijakan inilah

yang akan dikaji dalam buku bunga rampai dengan judul “Kebijakan Ekonomi Kontemporer”.

Bagian pertama ditulis oleh Lukman Adam dengan judul tulisan “Kebijakan Penentuan Harga Pembelian Beras Pemerintah”. Tulisan ini menyoroti isu tentang pangan yang merupakan isu strategis bagi kehidupan sebuah bangsa, khususnya terkait dengan permintaan dan penawaran produk pangan. Permintaan pangan khususnya pangan pokok, dipengaruhi terutama oleh harga dan ketersediaan. Gejolak atau fluktuasi harga pangan pokok akan mempengaruhi kestabilan politik bangsa. Pangan pokok di Indonesia terdiri dari beras, gandum, jagung, ubi kayu, kedelai, daging, susu, dan gula. Karena fluktuasi yang sangat rentan terhadap stabilitas politik, maka pemerintah menetapkan kebijakan stabilisasi harga pangan.

Bagian kedua ditulis oleh Juli Panglima Saragih dengan judul “Kebijakan Subsidi Pupuk dalam Menjaga Ketahanan Pangan: Studi di Provinsi Sulawesi Selatan dan Provinsi Jawa Tengah”. Tulisan ini menyoroti kebijakan terkait peningkatan kinerja sektor pertanian melalui peningkatan produksi beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Pupuk, merupakan salah satu faktor (sarana) produksi yang sangat menentukan kualitas dan kuantitas produksi dan produktivitas pertanian. Oleh karena itu, ketersediaan pupuk di pasar baik dari segi kuantitas, kualitas, dan harga yang terjangkau menjadi salah satu syarat yang harus dijamin pemerintah. Terkait hal tersebut, pemerintah bertanggungjawab untuk menyediakan sarana produksi ini dalam jumlah yang mencukupi kebutuhan masyarakat dengan diimbangi harga yang terjangkau oleh kalangan pengguna pupuk, seperti petani dan pekebun. Hal inilah yang mendasari pemerintah memberlakukan kebijakan subsidi pupuk bagi petani dalam kebijakan fiskal nasional (anggaran Negara).

Bagian ketiga ditulis oleh Hariyadi dengan judul tulisan “Arah Pengembangan Ketenagalistrikan Nasional 35.000 MW. Dalam rangka menegakkan momentum target pencapaian tingkat pertumbuhan ekonomi nasional dan kemandirian energi, pemerintah telah meluncurkan program percepatan pembangunan pembangkit listrik 35.000 MW (Program Listrik 35.000 MW) sampai tahun 2019. Sebagai sebuah program ambisius Pemerintahan Presiden Joko Widodo dan sekaligus merespons keragu-raguan masyarakat atas keberhasilannya, pemerintah berencana melakukan sejumlah

langkah terobosan. Sebagai wadah pengelola yang mengawal implementasi program ini, pemerintah telah menyiapkan sebuah tim nasional Program Listrik 35.000 MW yang sifatnya multisektoral dan melibatkan berbagai unsur kementerian dan lembaga (K/L) di bawah koordinasi Kemenko Perekonomian dan Kemenko Kemaritiman.

Bagian keempat ditulis oleh Achmad Sani Alhusain dengan judul “Kebijakan Pengembangan Ekonomi Kreatif”. Tulisan ini menyoroti masalah ekonomi kreatif yang merupakan sektor strategis di dalam pembangunan nasional. Ekonomi kreatif berkontribusi secara signifikan terhadap perekonomian nasional, yaitu: berkontribusi sebesar 7% terhadap PDB Nasional, menyerap 11,8 juta tenaga kerja atau sebesar 10,72% dari total tenaga kerja nasional, menciptakan 5,4 juta usaha atau sekitar 9,68% dari total jumlah usaha nasional, serta berkontribusi terhadap devisa negara sebesar 119 Triliun atau sebesar 5,72% dari total ekspor nasional.

Bagian Kelima ditulis oleh Sahat Aditua Fandhitya Silalahi dengan judul “Permasalahan Penyertaan Modal Negara pada Badan Usaha Milik Negara (Studi Kasus: PT Dok Perkapalan Surabaya dan PT Perkebunan Nusantara X)”. Tulisan ini membahas masalah penyertaan modal negara yang diberikan kepada dua buah BUMN, yaitu PT Dok Perkapalan Surabaya (Persero) dan PT Perkebunan Nusantara X. Dari aspek kinerja keuangan, baik PT Dok Perkapalan Surabaya (Persero) maupun PT Perkebunan Nusantara X memiliki permasalahan. PT Dok Perkapalan Surabaya (Persero) pada Tahun 2014 mengalami kerugian mencapai Rp54,87 miliar, dan PT Perkebunan Nusantara X, walaupun memperoleh keuntungan Rp22,49 miliar pada Tahun 2014; namun angka ini jauh menurun dibandingkan keuntungan pada Tahun 2013 yang mencapai Rp129,33 miliar.

Bagian keenam ditulis oleh Asep Ahmad Saefuloh dengan judul tulisan “Diskursus Jumlah Penduduk dan Kebijakan Pembangunan Kependudukan”. Tulisan ini menyoroti masalah kependudukan yang merupakan masalah umum yang dimiliki oleh setiap negara. Secara umum, masalah kependudukan biasanya dilihat pada aspek kuantitas, kualitas dan persebaran penduduknya. Aspek tersebut tentunya menimbulkan dampak terhadap kehidupan sosial ekonomi. Beberapa dampak sosial ekonomi yang ditimbulkan dari banyaknya

jumlah penduduk, antara lain: meningkatnya kebutuhan akan berbagai fasilitas sosial; meningkatnya persaingan dalam dunia kerja sehingga mempersempit lapangan dan peluang kerja; meningkatnya angka pengangguran (bagi mereka yang tidak mampu bersaing).

Dari keenam tulisan yang ada di buku ini, dapat dilihat bahwa permasalahan ekonomi yang dikaji disini meliputi banyak aspek. Oleh karena itu pendekatan kebijakan yang harus diambil oleh Pemerintah juga harus komprehensif dan melibatkan pihak-pihak yang bekerja di berbagai sektor. Seringkali kebijakan yang diimplementasikan dalam satu sektor tertentu juga memberikan pengaruh terhadap bagaimana kebijakan di sektor lain dijalankan.

Kami berharap tulisan dalam buku bunga rampai ini dapat memberikan tambahan pemahaman bagi pembaca mengenai permasalahan ekonomi di berbagai aspek beserta solusi kebijakan yang dapat diambil oleh Pemerintah. Tidak lupa kami mengharapkan kritik dan saran dari berbagai pihak untuk perbaikan buku bunga rampai ini ke depannya.

Jakarta, September 2015
Penyunting

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR KEPALA P3DI	iii
PROLOG.....	v
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xiv

BAB I

KEBIJAKAN PENENTUAN HARGA PEMBELIAN BERAS PEMERINTAH

<i>oleh: Lukman Adam</i>	<i>1</i>
I. Pendahuluan	1
II. Kebijakan HPP di Indonesia	4
III. Pengalaman Beberapa Negara Asia terhadap HPP	12
IV. Format Kebijakan Penentuan Harga Pembelian Pemerintah untuk Komoditas Beras.....	15
V. Penutup	22
Daftar Pustaka	25

BAB II

KEBIJAKAN SUBSIDI PUPUK DALAM MENJAGA KETAHANAN PANGAN STUDI DI PROVINSI SULAWESI SELATAN DAN PROVINSI JAWA TENGAH

<i>oleh: Juli Panglima Saragih</i>	<i>29</i>
I. Pendahuluan	29
II. Kerangka Teori.....	38
III. Metodologi Penelitian	41
IV. Hasil Penelitian	42
V. Penutup	66
Daftar Pustaka	68

BAB III

ARAH PENGEMBANGAN

KETENAGALISTRIKAN NASIONAL 35.000 MW

<i>oleh: Hariyadi</i>	73
I. Pendahuluan	73
II. Kelayakan Program Listrik 35.000 MW	76
III. Tantangan Program Listrik 35.000 MW.....	77
IV. Arah Penuntasan Program Listrik 35.000 MW	82
V. Penutup	90
Daftar Pustaka.....	93

BAB IV

KEBIJAKAN PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF

<i>oleh: Achmad Sani Alhusain</i>	97
I. Pendahuluan	97
II. Konsep dan Ruang Lingkup Ekonomi Kreatif.....	99
III. Penutup	122
Daftar Pustaka.....	123

BAB V

PERMASALAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA

PADA BADAN USAHA MILIK NEGARA

(STUDI KASUS: PT DOK PERKAPALAN SURABAYA

DAN PT PERKEBUNAN NUSANTARA X)

<i>oleh: Sahat Aditua F Silalahi</i>	127
I. Pendahuluan	127
II. Kerangka Pemikiran	130
III. Pembahasan	135
IV. Kesimpulan dan Saran	147
Daftar Pustaka.....	149

BAB VI

DISKURSUS JUMLAH PENDUDUK DAN

KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN

<i>oleh: Asep Ahmad Saefuloh</i>	151
I. Pendahuluan	151
II. Diskursus Jumlah Penduduk.....	156
III. Perlu Tidaknya Pengendalian Penduduk.....	162
IV. Kebijakan Pembangunan Kependudukan	165
V. Signifikansi Kewilayahan.....	168

VI. Penutup	169
Daftar Pustaka	172
EPILOG	177
INDEKS	181
BIOGRAFI PENULIS	184

DAFTAR TABEL

Tabel 1.	Harga Pembelian Pemerintah dan Kebijakan Perberasan Tahun 2004 – 2015.....	10
Tabel 1.	Prognosa Produksi Padi (Gabah Kering Giling) Nasional tahun 2011-2014.....	31
Tabel 2.	Perkembangan Anggaran Subsidi, HPP, HET, dan Volume Pupuk Tahun Anggaran 2011 dan 2012	35
Tabel 3.	PDRB Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah (atas dasar harga berlaku) Tahun 2010; 2011 dan 2012 (Rpjuta).....	45
Tabel 4.	Sasaran Produksi Komoditas Padi Berdasarkan Daerah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah Tahun 2012	47
Tabel 5.	Alokasi dan Realisasi Penggunaan Pupuk di Provinsi Jawa Tengah, Tahun 2008-2012 (Ton)	50
Tabel 6.	Penyaluran Pupuk Bersubsidi di Provinsi Jawa Tengah (2007-2013) Dalam (Ton).....	54
Tabel 7.	Data Produksi Pupuk Urea PT. Pupuk Sriwidjaja Palembang (Tahun 2008 – 2012).....	55
Tabel 8.	Jumlah Distributor dan Jumlah Pengecer/Kios, per Kabupaten/Kota di Jawa Tengah sampai Tahun 2013	57
Tabel 9.	Realisasi Penyaluran Pupuk Bersubsidi di Provinsi Sulawesi Selatan (<i>Delivery Order</i>) Tahun 2013 (Ton).....	65
Tabel 1.	Nilai Usulan Penyertaan Modal Negara (PMN) yang Diajukan Pada RAPBN-P Tahun Anggaran 2015.....	136

Tabel 2.	Kondisi Keuangan PT Dok Perkapalan Surabaya (Persero) Tahun 2009-2014 (dalam miliar rupiah)	140
Tabel 1.	Jumlah Penduduk di Lima Negara Tahun 2014	152
Tabel 2.	Komposisi Penduduk Indonesia 2010-2035	152
Tabel 3.	Perkembangan Ketenagakerjaan Indonesia (2010-2014)	161

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.	Kurva Pembentukan Harga Dasar Gabah dan Harga Dasar Pembelian Pemerintah	5
Gambar 2.	Format Kebijakan Penentuan HPP	16
Gambar 3.	Saluran Tataniaga Beras di Indonesia	21
Gambar 1.	Perkembangan Produksi Padi Provinsi Jawa Tengah dan Sulawesi Selatan Tahun 2008-2014	32
Gambar 2.	Grafik Perkembangan Anggaran Subsidi Pupuk dan Subsidi Non-Energi Lainnya, Tahun 2006-2013 (Rp.triliun)	33
Gambar 3.	Alur Distribusi Pupuk Bersubsidi	34
Gambar 4.	Kurva Subsidi	39
Gambar 5.	Grafik Alokasi Pupuk Bersubsidi Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013	53
Gambar 6.	Grafik Kebutuhan Pupuk Bersubsidi Sektor Pangan & Hortikultura Tahun 2013	53
Gambar 7.	Grafik Alokasi Pupuk Bersubsidi Berdasarkan Jenis Pupuk di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013	54
Gambar 8.	Alokasi Pupuk Bersubsidi Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013	65
Gambar 1.	Pergeseran Orientasi Ekonomi Dunia Barat	102
Gambar 2.	Pertumbuhan dan Kontribusi PDB Subsektor Industri Kreatif Dibandingkan Subsektor Lainnya	110
Gambar 1.	Contoh S-Curve dalam Manajemen Proyek	146

EPILOG

Kebijakan yang diambil Pemerintah untuk menyelesaikan permasalahan ekonomi di seluruh aspek harus bersifat komprehensif dan menyeluruh sebagaimana disebutkan di dalam bagian awal buku bunga rampai “Kebijakan Ekonomi Kontemporer ini”.

Pada tulisan pertama disimpulkan bahwa Kebijakan penentuan HPP untuk beras ditentukan berdasarkan produksi padi yang tersedia. Pemerintah setiap tahun menentukan harga dasar (*floor price*) bagi produsen dan harga tertinggi (*ceiling price*) bagi konsumen. Bulog bertanggung jawab untuk menjamin harga beras berada diantara harga tertinggi dan terendah tersebut dengan melakukan operasi pasar dan pendistribusian. Upaya untuk menjaga kestabilan harga ini ditetapkan berdasarkan proporsi keuntungan yang mungkin diterima oleh produsen, tingkat inflasi, dan keterjangkauan konsumen.

Kebijakan penentuan HPP yang ideal setidaknya perlu didukung oleh beberapa faktor, yaitu: (a) Harga Referensi Gabah dan Beras Secara Regional. Penetapan HPP gabah dan beras yang berbeda antarwilayah, tentunya dengan mempertimbangkan kesanggupan daerah dalam melakukan penjaminan stabilitas harga layak untuk dilakukan; (b) Meningkatkan Peran Bulog dan Badan Pangan Daerah; (c) Meningkatkan Peran Pemerintah Daerah; dan (d) memperbaiki tata niaga beras.

Pada tulisan kedua permasalahan kependudukan diselesaikan dengan pendekatan otonomi dan desentralisasi di mana mana pemerintah daerah semakin berperan dalam pembangunan di daerah masing-masing. Dengan demikian implementasi program KB, pendidikan, kesehatan dan penciptaan lapangan kerja akan lebih efektif dan tepat sasaran bila peran pemerintah daerah yang ditingkatkan. Sehingga persoalan yang muncul adalah bagaimana pemerintah daerah meningkatkan peran pembangunannya. Karena

itu dalam menata pembangunan di daerah, maka perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di daerah haruslah dilakukan perombakan.

Hal ini sejalan dengan kewenangan yang dipunyai oleh pusat yaitu kebijakan tentang perencanaan nasional dan pengendalian pembangunan nasional secara makro. Perencanaan pembangunan nasional melalui program dan proyek sektoral (melalui anggaran pembangunan pusat) harus diintegrasikan ke dalam perencanaan pembangunan daerah.

Tulisan ketiga menyimpulkan bahwa program pembangunan pembangkit listrik 35.000 MW menjadi momentum target pencapaian tingkat pertumbuhan dan pembangunan ekonomi nasional dan kemandirian energi lima tahun ke depan. Program ini juga sekaligus merefleksikan sebuah lompatan besar dalam pengembangan ketenagalistrikan ke depan. Oleh karena itu, pekerjaan rumah besar yang harus dikelola pemerintah adalah konsistensi kebijakan yang telah ditetapkan. Secara normatif, aspek suprastruktur berupa kerangka hukum dan isu-isu lain yang lebih teknis menyangkut rezim perijinan dan pembebasan lahan misalnya, telah dicoba disasar. Aspek lain yang tidak kalah pentingnya adalah misi yang sebenarnya bisa berdimensi politis tetapi memiliki nilai yang sangat strategis dalam upaya meningkatkan rasa keadilan dan tingkat kesejahteraan secara umum, yakni target pencapaian rasio elektrifikasi 100% pada tahun 2019.

Sedangkan tulisan keempat menyimpulkan bahwa kebijakan subsidi pupuk merupakan suatu kebijakan yang diterapkan pemerintah agar mampu berperan sebagai insentif bagi petani untuk meningkatkan produksi dan produktivitas pangan, serta peningkatan pendapatan petani dengan meningkatnya produksi pangan khususnya padi (beras). Kebijakan subsidi pupuk adalah juga dimaksudkan untuk menjaga ketahanan pangan masyarakat dengan semakin meningkatnya produksi pangan.

Tulisan kelima menekankan pada perlunya pengawasan pada penggunaan tambahan penyertaan modal negara pada BUMN. Disini penulis mengusulkan agar di setiap persetujuan pemberian penyertaan modal negara pada BUMN juga diikuti dengan mekanisme pengawasan melalui Panitia Kerja Pengawasan yang dibentuk oleh DPR.

Sedangkan tulisan keenam menyimpulkan bahwa industri berbasis ekonomi kreatif akan memberikan kontribusi besar bagi pertumbuhan ekonomi nasional di masa yang akan datang. Bangsa Indonesia dapat mewujudkan target pencapaian tersebut jika semua bersatu, bersama-sama, bergotong royong untuk memperkuat pondasi pembangunan ekonomi kreatif yaitu; orang kreatif, memperkuat kelembagaan sebagai payung dari pengembangan ekonomi kreatif yang dapat memperkuat lima pilar pengembangan ekonomi kreatif, yaitu sumber daya alam dan budaya, industri, pembiayaan, infrastruktur dan teknologi, dan pemasaran.

Demikian epilog dari buku bunga rampai “Kebijakan Ekonomi Kontemporer” ini, semoga dapat memperkaya khazanah pemahaman kita mengenai kebijakan untuk memecahkan permasalahan publik khususnya di bidang ekonomi.

Jakarta, September 2015
Penyunting

INDEKS

A

Analisis, 42, 75, 76, 107, 129

Arah, 61, 73, 76, 82, 105, 119, 120

B

Badan Hukum, 130

Bensin, 86

Beras, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12,
13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21,
22, 23, 24, 30, 31, 37, 38, 41, 64

Bioetanol, 84, 85, 86, 141

Budaya, 99, 104, 108, 112, 113, 114,
115, 116, 117, 118, 122, 151,
155

Bulog, 6, 8, 10, 11, 16, 17, 18, 19, 20,
22, 24, 31

BUMN, 19, 34, 35, 36, 42, 60, 64, 66,
127, 128, 129, 130, 131, 132,
133, 134, 135, 136, 137, 139,
143, 144, 145, 146, 147, 148

C

Cadangan, 6, 8, 15, 16, 18, 23, 41, 74,
79, 81, 82, 85, 104, 130

D

Daerah, 16, 17, 19, 20, 24, 32, 34, 35,
38, 39, 41, 42, 44, 46, 47, 49, 50,
80, 88, 98, 108, 119, 130, 135,
151, 154, 155, 166, 169, 170,
171

Daging, 1, 41

Desain, 98, 105, 106, 107, 115, 119

Desentralisasi, 19, 20, 170

Distribusi, 22, 34, 35, 36, 37, 40, 51,
56, 64, 66, 67, 103, 105, 106,
121, 156, 161

E

Elektrifikasi, 75, 76, 77, 91

Energi, 33, 73, 74, 75, 77, 78, 79, 80,
81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89,
90, 91, 141

F

Fasilitas, 2, 46, 53, 119, 121, 122,
132, 151, 153, 154

Fesyen, 98, 106, 107

Film, 98, 105, 106, 107, 115

Fiskal, 30, 40, 80, 87, 170

Fotografi, 98, 106, 115

G

Gabah, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 11, 15, 16, 17,
18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 31, 37,
60, 64, 67

Gandum, 1, 3, 14

Gas Bumi, 92

Gizi, 153, 157, 167

H

Harga, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,
12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20,

21, 22, 23, 24, 30, 31, 32, 33, 34,
35, 36, 37, 38, 39, 40, 43, 44, 45,
56, 59, 60, 62, 66, 67, 77, 78, 84,
87, 110, 117, 142
HET, 32, 34, 35, 37, 56, 60, 61, 66

I

Iklim, 1, 3, 80, 81, 99, 104, 113, 117,
133, 153, 165, 168
Industri, 3, 10, 11, 13, 22, 29, 33, 38,
40, 43, 49, 63, 86, 98, 99, 100,
101, 102, 104, 105, 106, 107,
108, 110, 111, 114, 115, 116,
117, 120, 121, 122, 135, 141,
143, 157, 168
Insentif, 1, 7, 10, 11, 12, 15, 16, 17,
22, 30, 40, 50, 74, 77, 78, 87,
119
Interaktif, 98, 106, 107, 115

J

Jagung, 1, 2, 6, 41, 47, 48

K

Kapal, 137, 138, 139, 140
Kedelai, 1, 2, 41
Kependudukan, 1, 151, 152, 153,
154, 156, 158, 165, 170
Kerajinan, 98, 105, 106, 107, 111,
114, 115
Ketenagalistrikan, 73, 76, 80, 82, 90,
91, 92
Ketersediaan, 1, 30, 37, 48, 49, 53,
84, 90, 112, 116, 117, 120, 166
Kontrasepsi, 165, 166

L

Laba, 19, 134, 137, 140
Lapangan kerja, 133, 161, 167, 168,
170

Leverage, 136

Listrik, 40, 44, 73, 74, 75, 76, 77, 78,
79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87,
88, 89, 90, 91, 92, 110

M

Malthusian, 156
Maritim, 74, 135
Marxian, 156
Merpati, 147
Musik, 98, 105, 106, 107, 111, 115

N

NPK, 32, 33, 34, 35, 36, 50, 65, 71

O

Otonomi, 19, 46, 170

P

Padi, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13,
14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 30,
31, 32, 34, 37, 38, 41, 46, 47, 62,
64, 66, 67
Pangan, 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 12, 13, 15,
16, 19, 20, 23, 24, 30, 37, 38, 39,
40, 41, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 83,
86, 135, 168
Panas bumi, 82, 83, 84, 86, 87, 88
Pasokan, 4, 8, 34, 74, 79, 89, 121
Petani, 3, 4, 5, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14,
15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23,
30, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 38, 48,
49, 50, 51, 56, 57, 58, 59, 60, 61,
62, 66, 67, 142, 168
PLTN 79, 88, 89, 90, 92
Pemasaran, 13, 21, 39, 47, 56, 106,
119, 120, 121, 122, 134
Pendidikan, 41, 138, 153, 157, 164,
165, 166, 167, 170

Pengangguran, 100, 101, 151, 160,
 161, 165, 167, 168, 170
 Pengawasan, 2, 53, 59, 74, 105, 129,
 134, 135, 146, 147, 148
 Pengecer, 22, 34, 36, 56, 57, 58, 59,
 60, 61, 66, 67
 Penggilingan, 3, 10, 13, 14, 16, 17,
 18, 20, 21, 22, 23
 Pekebun, 30, 51, 61
 Perkapita, 153, 156, 158, 160, 163
 Perkapalan, 127, 128, 129, 137, 138,
 140, 143, 147
 Perkebunan, 51, 61, 83, 127, 128,
 129, 140, 141, 143, 147
 Pokok, 1, 2, 4, 8, 12, 16, 32, 40, 46,
 57, 119, 121, 137
 Produksi, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 14,
 15, 16, 17, 18, 20, 22, 29, 30, 31,
 32, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 46,
 47, 48, 49, 55, 57, 64, 66, 67, 81,
 82, 83, 84, 85, 87, 92, 102, 103,
 105, 106, 107, 131, 132, 134,
 138, 141, 142, 143, 159, 160,
 163, 164, 165, 166, 170
 Pupuk, 7, 9, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35,
 36, 37, 38, 50, 51, 53, 54, 55, 56,
 57, 58, 59, 60, 61, 62, 64, 65, 66,
 67, 71

R

Radiasi, 89
 Reproduksi, 106, 107, 166
Roadmapp, 144, 145, 148

S

Saham, 107, 128, 130, 131
 Seni, 44, 98, 101, 105, 106, 107, 108,
 111, 115, 119
 Showbiz, 106
 Subsidi, 1, 8, 12, 29, 30, 31, 32, 34,
 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 52,
 53, 54, 57, 60, 62, 66, 67
 Swasta, 1, 14, 41, 77, 78, 88, 109,
 127, 131, 141

U

Ubi kayu, 1
 Urea, 7, 9, 32, 33, 34, 55, 56, 57, 59,
 60, 61, 64, 67, 71
 Usaha, 1, 2, 3, 4, 10, 17, 18, 19, 20,
 40, 46, 62, 63, 87, 98, 99, 104,
 106, 107, 111, 112, 113, 114,
 116, 117, 119, 120, 121, 123,
 127, 128, 130, 132, 134, 135,
 137, 139, 140, 145, 147, 153,
 156, 168

W

Watt, 82
 World Bank, 161

BIOGRAFI PENULIS

Lukman Adam, Peneliti Muda bidang ekonomi dan kebijakan publik di P3DI Setjen DPR. Menyelesaikan studi S1 dan S2 di Institut Pertanian Bogor. Kepakarannya adalah ilmu kebijakan. Topik penelitian yang telah dilakukan penulis adalah kelautan (2011), pesisir (2012), energi baru terbarukan (2013), karantina hewan, ikan, dan tumbuhan (2014), dan fasilitasi perdagangan (2015). Mulai tahun 2010 sampai saat ini, penulis terlibat aktif dalam pembahasan RUU yang terkait dengan pangan, pertanian, perikanan, dan kehutanan. Penulis dapat dihubungi di mada.kenn@gmail.com.

Juli Panglima Saragih, dilahirkan di Kota Tebingtinggi Sumatera Utara, tanggal 21 Juli 1964. Pekerjaan saat ini (sampai 2015), adalah Peneliti Madya Kebijakan Publik di P3DI Setjen DPR RI. Pendidikan terakhir adalah Strata 2 Magister Manajemen, Universitas Nusantara, Jakarta 1999. Pendidikan S1 dari FISIP Universitas Padjadjaran Bandung 1988. Penulis juga aktif sebagai Anggota Redaksi Majalah Kajian, Penerbit PPPDI, dan Redaktur Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik (JEKP) penerbit P3DI Setjen DPR RI. Aktif dalam penyusunan dan pembahasan UU undang, seperti: UU Anti Monopoli, UU Lembaga Keuangan Mikro, UU Perkoperasian, UU Perindustrian, RUU Migas, dan UU Usaha Perasuransian. Aktif melakukan penelitian lapangan ke daerah, baik dalam rangka tugas pokok dan fungsi, serta dalam penyusunan draft RUU dan Naskah Akademik. Kemahiran bahasa asing: Bahasa Inggris lisan dan tulisan. Menulis beberapa buku, baik buku bunga rampai maupun buku individu. Kunjungan ke luar negeri dalam rangka dinas: AS, Australia, India, Canada, Philippina, Thailand, dan Vietnam.

Hariyadi, lahir di Banyumas, 11-12-1970, adalah peneliti madya bidang Ekonomi dan Kebijakan Publik pada Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi Setjen DPR RI, Jakarta (1998-sekarang). Menyelesaikan

pendidikan S-1 pada Jurusan Ilmu Hubungan Internasional Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta (1990-1995) dan *Master in Public Policy Programme, Faculty of Economics, Business and Policy Studies*, Univ. of Brunei Darussalam, Brunei Darussalam (2001-02). Serangkaian kursus yang pernah diikuti antara lain, *Joint Training Program in Parliamentary Research and Information Service Provision, the Centre for Democratic Institutions*, Parlemen Australia, Canberra, 16-27 Agustus 1999, *Parliamentary Internship Program* (ITEC Plan Sponsorship), Lok Sabha Secretariat, New Delhi India, 1-30 November 2007, *Advanced Professional Training, Managing Global Governance* (MGG), Bonn, Republik Federal Jerman, Juni-Desember 2011, dan magang dalam kerangka *MGG Project Phase* di Badan Lingkungan Uni Eropa, Copenhagen, Denmark (Oktober-Desember 2011). Di samping aktif dalam kegiatan sosial, juga aktif menulis di beberapa media nasional dan lokal.

Achmad Sani Alhusain, SE., MA., lahir di Cimahi, 11 Mei 1972. Menyelesaikan Sarjana Ekonomi jurusan Manajemen, Universitas Padjadjaran (UNPAD) Bandung, tahun 1998. Menyelesaikan *Master of Art in Ecoeconomic Policy* di *Andrew Young School of Policy Studies, Georgia State University, Atlanta, USA*, 2002. Penulis merupakan Peneliti Muda golongan III/D dengan bidang kepakaran Kebijakan Publik pada Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi (P3DI) Sekretariat Jenderal DPR RI. Penulis aktif melakukan berbagai penelitian, pengkajian, dan analisa yang berhubungan dengan isu-isu kebijakan publik serta memberikan pendampingan pada Alat Kelengkapan Dewan dan dalam penyusunan Rancangan Undang-undang yang sesuai dengan bidang kepakaran.

Sahat Aditua Fandhitya Silalahi, adalah Peneliti Muda Bidang Ekonomi & Kebijakan Publik, di Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi (P3DI), Sekretariat Jenderal DPR-RI. Penulis memperoleh gelar S-2 dari Magister Manajemen Universitas Gadjah Mada dan menaruh minat pada kebijakan di bidang industri, perdagangan, ketenagakerjaan, dan pengelolaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Beberapa tulisan yang pernah dipublikasikan adalah Kebijakan Industrialisasi dalam Rangka Menghadapi Globalisasi dan Liberalisasi Ekonomi, Kajian atas Kemungkinan Pembentukan Super Holding BUMN, Kebijakan Pengupahan di Indonesia Beserta Saran

Kebijakan, dan Hot Money di Indonesia: Resiko dan Pengelolaannya. Penulis dapat dihubungi melalui alamat email: sahatsilalahi81@gmail.com

Asep Ahmad Saefuloh, lahir di Tasikmalaya 1 September 1971, masuk sebagai peneliti Tim Ekonomi dan Kebijakan Publik pada Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi (P3DI) Sekretariat Jenderal DPR-RI tahun 1997. Jenjang jabatan fungsional saat ini adalah Peneliti Madya (IVC) bidang Kebijakan Publik. Latar belakang pendidikan adalah Sarjana Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan (IESP), Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Surakarta/Sebelas Maret (UNS) dan lulus tahun 1996. Kemudian melanjutkan studi pada Program Magister Kajian Kependudukan dan Ekonomi Sumber Daya Manusia, Universitas Indonesia (UI) dan lulus tahun 2003. Terakhir, menyelesaikan Program S3 Bidang Manajemen Sumber Daya Manusia (MSDM), Universitas Negeri Jakarta (UNJ) tahun 2012.

KEBIJAKAN EKONOMI KONTEMPORER

Buku yang bertajuk “Kebijakan Ekonomi Kontemporer” ini dibagi dalam enam bab. Bab *pertama*, berisi kajian tentang kebijakan penentuan harga pembelian beras pemerintah. Bab *kedua*, berisi studi tentang kebijakan subsidi pupuk dalam menjaga ketahanan pangan: Studi di Provinsi Sulawesi Selatan dan Provinsi Jawa Tengah. Bab *ketiga*, berisi studi tentang arah pengembangan ketenagalistrikan nasional 35.000 MW. Bab *keempat*, menjelaskan tentang kebijakan pengembangan ekonomi kreatif. Bab *kelima*, mengkaji tentang permasalahan penyertaan modal negara pada badan usaha milik negara: Studi kasus PT Dok Perkapalan Surabaya dan PT Perekebunan Nusantara X. Bab *keenam*, menelaah diskursus jumlah penduduk dan kebijakan pembangunan kependudukan.



Diterbitkan oleh :
P3DI Setjen DPR RI dan Azza Grafika



ISBN 978-602-1247-36-5

